



**ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGENAAN PPN ATAS  
TRANSAKSI JUAL BELI GAS BUMI (PUTUSAN  
PENINJAUANKEMBALI NOMOR: PUT-3362/B/PK/PJK/2020)**

**TESIS**

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar  
Magister Hukum**

**EVELINE JULIETA DORTIA SIANIPAR  
2110622023**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
2023**

## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Eveline Julieta Dortia Sianipar

NIM : 2110622023

Tanggal : 17 Juli 2023

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataannya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 17 Juli 2023

Yang Menyatakan,



Eveline Julieta Dortia Sianip

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta,  
saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eveline Julieta Doria Sianipar

NIM : 2110622023

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada  
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Hak Bebas Royalti Non  
eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:  
**ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGENAAN PPN ATAS TRANSAKSI  
JUAL BELI GAS BUMI (PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NOMOR:  
PUT-3362/B/PK/PJK/2020)**

Beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas  
Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/  
formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan  
mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai  
penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat  
dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 17 Juli 2023



Eveline Julieta Doria Sianipar



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450  
Telepon 021-7656971, Fax 021-7656904  
Laman: fh.upnvj.ac.id, e-mail: fh@upnvj.ac.id

### PENGESAHAN

Tesis diajukan oleh :  
Nama : Eveline Julieta Doria Sianipar  
NRP : 2110622023  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Judul Tesis : ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGENAAN PPN  
ATAS TRANSAKSI JUAL BELI GAS BUMI  
(PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NOMOR:  
PUT-3362/B/PK/PJK/ 2020)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji serta telah diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Ketua Penguji

Prof. Dr. Arrisman, S.H., M.H.  
NIDN: 0316126004

Penguji I

Dr. Heru Sugiyono, S.H., M.H.  
NIDN: 217121294

Penguji II/Pembimbing

Dr. Imam Harvanto, S.H., M.H.  
NIDN: 0306126204

Kaprodi

Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H., M.H., M.Tr., Adm. Kes  
NIDN: 199304292022031009



**ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGENAAN PPN ATAS  
TRANSAKSI JUAL BELI GAS BUMI**  
**(PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NOMOR: PUT-  
3362/B/PK/PJK/2020)**

**Eveline Julieta Doria Sianipar**

**Abstrak**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Tidak semua konsumsi barang dan jasa dikenakan PPN, salah satu pengecualian pengenaan PPN adalah terhadap Gas Bumi yang merupakan jenis barang hasil pertambangan atau pengeboran yang diambil dari sumbernya sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak (UU PPN) dan PMK-252/2012 (PMK). Praktiknya, pengenaan PPN yang dikenakan oleh Direktorat Jenderal Pajak tidak memberikan rasa kepastian hukum dan keadilan hukum, contohnya adalah pada yang terjadi pada kasus pajak antara PT. Perusahaan Gas Negara melawan Direktorat Jenderal Pajak. Dimana pada Putusan banding, Pengadilan Pajak telah mengabulkan permohonan PT. Perusahaan Gas Negara namun kemudian Direktorat Jenderal Pajak mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali sehingga PT. Perusahaan Gas Negara harus membayar PPN yang sangat besar. Rumusan masalah dalam Tesis ini adalah bagaimana pemberlakuan PPN atas penyaluran gas bumi dipandang dari hukum perpajakan di Indonesia dan bagaimana analisis hukum terhadap Putusan Peninjauan Kembali Nomor PUT-3362/B/PK/PJK/2020. Metode penelitian dalam Tesis ini menggunakan metode penelitian Normatif Yuridis. Hasil pembahasan dari rumusan masalah pertama adalah pemberlakuan PPN atas penyaluran gas sebenarnya sudah diatur dalam UU PPN dan PMK yang telah mengecualikan gas bumi hasil tambang dari kualifikasi objek PPN. Hasil pembahasan dari rumusan masalah kedua adalah pertimbangan hukum dalam Putusan Peninjauan Kembali adalah kurang tepat karena seharusnya Gas Bumi tidak dikenakan PPN karena Gas Bumi tersebut tidak menambah value added dan karena proses pengangkutan Gas Bumi melalui pipa seharusnya dianggap menjadi satu kesatuan atas penjualan gas bumi karena proses tersebut hanya satu-satunya cara untuk menjual gas bumi sehingga pipa transmisi gas bumi sebenarnya hanyalah perantara dalam proses penjualan gas bumi bukan objek jasa yang dibebankan PPN.

**Kata Kunci:** Pajak Pertambahan Nilai, Transaksi, Jual Gas Bumi

**LEGAL ANALYSIS OF VAT IMPOSITION FOR  
NATURAL GAS SALE AND PURCHASE TRANSACTION  
(JUDICIAL REVIEW DECISION NUMBER: PUT-  
3362/B/PK/PJK/2020)**

**Eveline Julieta Doria Sianipar**

**Abstract**

*Value Added Tax (VAT) is a tax on the consumption of goods and services in the Customs area which is imposed in stages in each production and distribution channel. Not all consumption of goods and services is subject to VAT, one of the exceptions to the imposition of VAT is Natural Gas, which is a type of mining or drilling product taken from its source as stipulated in Law Number 42 of 2009 concerning Value Added Tax on Goods and Services and Tax (VAT Act) and PMK-252/2012 (PMK). In practice, the imposition of VAT imposed by the Directorate General of Taxes does not provide a sense of legal certainty and legal justice, an example is what happened in the tax case between PT. State Gas Company against the Directorate General of Taxes. Where in the appeal decision, the Tax Court has granted PT. Perusahaan Gas Negara but then the Directorate General of Taxes submitted a request for judicial review and the Supreme Court granted the request for review so that PT. The State Gas Company has to pay a very large amount of VAT. The formulation of the problem in this thesis is how the application of VAT on the distribution of natural gas is viewed from tax law in Indonesia and how is the legal analysis of the Judicial Review Decision Number PUT-3362/B/PK/PJK/2020. The research method in this thesis uses normative juridical research methods. The results of the discussion from the first problem formulation is that the application of VAT on gas distribution has actually been regulated in the VAT and PMK Laws which have excluded natural gas from mining products from qualifying for VAT objects. The results of the discussion from the second problem formulation are that the legal considerations in the Review Decision are inappropriate because Natural Gas should not be subject to VAT because Natural Gas does not add value added and because the process of transporting Natural Gas through pipes should be considered as an integral part of natural gas sales because the process This is the only way to sell natural gas, so that natural gas transmission pipelines are actually only intermediaries in the natural gas sales process, not service objects subject to VAT.*

**Keywords:** *Value Added Tax, Transactions, Selling Natural Gas*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan penyertaan-Nya, Penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul *Analisis Hukum Terhadap Pengenaan PPN Atas Transaksi Jual Beli Gas Bahan Pangan Peninjauan Kembali Nomor: Put-3362/B/Pk/Pjk/2020* secara baik dadatepatawaktu. Tesis ini merupakan persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum penulis menyadari dengan segala keterbatasan yang ada, Tesis ini dapat diselesaikan karena banyaknya *support* dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Anter Venus, MA, Comm selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
2. Dr. Suherman, S.H., L.L.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Bapak Dr. Beniharmoni, SH., LLM., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
3. Bapak Dr. Slamet Tri Wahyudi, SH., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
4. Bapak Taupiqqurrahman, SH., M.KN., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Universitas Nasional Veteran Jakarta.
5. Dr. Handar S.B., S.H., M.H., M.Tr.Adm.Kes selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional Jakarta.
6. Dr. Drs. Imam Haryanto, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing saya yang telah banyak memberikan arahan dan saran yang sangat bermanfaat selama proses bimbingan berlangsung, sehingga segala kesulitan-kesulitan yang penulis hadapi dalam penulisan tesis dapat teratas.
7. Seluruh dosen dan staf pengajar yang telah memberikan bimbingan ilmu pengetahuan dan pengalaman selama perkuliahan berjalan.
8. Seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta atas segala pelayanannya.
9. Suami dan anak-anak penulis (Shalomikha Hutabarat dan Shalomitha Hutabarat)

serta orangtua yang telah memberikan dukungan moril selama penulis menjalankan masa perkuliahan dan menyelesaikan tesis.

10. Seluruh teman-teman Angkatan 2021 Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, khususnya teman-teman konsentrasi Hukum Bisnis, terima kasih atas kebersamaan dan persahabatan yang terjalin selama perkuliahan.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu karena terlalu banyak pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis hingga tesis ini dapat diselesaikan.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga penulis dapat menjadi lebih baik dalam karya-karya ilmiah lainnya. Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat khususnya di bidang ilmu hukum baik secara teori maupun praktik serta bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya.

Jakarta, 10 Juli 2023



Eveline Julieta Doria Sianipar

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangkan Teoritis dan Kerangka Konspetual .....	8
F. Literatur Review.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
A. Sejarah Perpajakan Indonesia.....	18
B. Pengertian Pajak.....	23
C. Jenis – Jenis Pajak .....	25
D. Sistem Pemungutan Pajak .....	25
E. Tata Cara Pemungutan Pajak .....	26
F. Timbulnya Hutang Pajak.....	28
G. Selesaiyta Hutang Pajak .....	28
H. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	29
I. Sejarah PPN.....	30
1. Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	33
J. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) .....	33
K. Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN) .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Pendekatan Penelitian .....	37
C. Sifat Data.....	39
D. Analisis Penelitian.....	39
E. Sumber Bahan Hukum .....	40
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
A. Pemberlakuan PPN atas Penyaluran Gas Bumi dipadandang dari Hukum Perpajakan Indonesia .....	42
1. Filosofi Pajak Pertambahan Nilai untuk Perekonomian Negara .....	42

2. Filosofi Pajak Pertambahan Nilai dalam Hukum Pajak di Indonesia.....	43
3. Pemberlakuan PPN Terhadap Perusahaan yang Bergerak di Bidang Gas Bumi .....	50
B. Analisis Hukum Terhadap Pengenaan PPN Atas Transaksi Jual Beli Gas Bumi (Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali Nomor: Put-3362/B/Pk/Pjk/2020).....	57
1. Kasus Posisi .....	58
2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim.....	65
3. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan No. 3362/B/PK/Pjk/2020 .....	69
4. Analisis Putusan Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan No. 3362/B/PK/Pjk/2020.....	69
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN</b>	